**ABSTRAK**

Partai Politik mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dalam mendukung hal ini maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap partai politik baik di pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah diberikan Bantuan Keuangan yang bersumber baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) atau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).Maka dalam penggunaan kegiatan partai yang dibiayai dari APBN / APBD harus digunakan secara bertanggungjawab dan juga transparan, sehingga dalam penggunaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi partai politik. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terkait dengan proses pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Depok. Penulis melakukan penelitian yang berjudul **“EVALUASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2014-2017 DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT** “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ; 1) evaluasi dari proses pengelolaan dana bantuan keuangan partai politik di Kota Depok; 2) faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam proses pengelolaan dana bantuan keuangan partai politik di Kota Depok; 3) mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses pengelolaan dana bantuan keuangan partai politik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bersifat deskriptif, dengan pendekatan induktif. Dalam melakukan penelitian objek di lapangan berdasarkan fakta yang ada, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah didapat penulis lakukan teknik analisis data yaitu dengan Reduksi Data, Penyajian Data, dan melakuakan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hambatan yang terjadi selama proses pengelolaan yaitu ; 1) jumlah dana bantuan yang masih kurang; 2) keterlambatan pencairan dana bantuan keuangan pertai; 3) kendala partai dalam membuat laporan pertanggungjawaban ( LPJ ) dana bantuan keuangan partai politik di Kota Depok; 4) adanya ketidak konsistenan dari pihak partai dalam penggunaan dana bantuan keuangan. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain; 1 ) melakukan bimbingan teknis; 2) memebuat standar format baku untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan; 3) pemberian sanksi yang tegas ; 4 ) adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu Peraturan Pemerintah ( PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kenaikan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik.

***ABSTRACT***

*Political parties have the basic tasks and functions to provide political education to the community. In support of this then in accordance with the legislation in force that any political party either in the Central Government as well as local governance given financial aid sourced from both the revenue and Expenditure Budget of the State ( STATE BUDGET) or sourced from Budgetary income and Expenditure area (BUDGETS). Then in the use of the party's activities were financed from STATE BUDGET/BUDGETS should be used in responsible and transparent, so that also in its use can be done effectively and efficiently, in accordance with the purpose and functions of the principal political parties. In this case the author does observation related to the process of management of the Fund financial assistance of a political party in the city of Depok. The authors conducted a study entitled "EVALUATION of the MANAGEMENT of the FUND FINANCIAL ASSISTANCE of a POLITICAL PARTY of the YEAR 2014-2017 in DEPOK, WEST JAVA PROVINCE". This research aims to find out; 1) evaluation of process management of financial aid funds of political parties in the city of Depok; 2) what factors are barriers in the process of management of financial aid funds of political parties in the city of Depok; 3) knowing the efforts made in overcoming the obstacles that occur in the process of management of the Fund financial assistance of a political party.*

*This study uses qualitative methods, is descriptive, inductive approach. In doing the research object in the field based on the fact that there are, then the writers use the technique of data collection by observation, interviews, and documentation. The data already obtained the author did data analysis techniques, namely with the reduction of Data, Data Presentation, and data verification craft made.*

*The results of this study showed that the resistance which occurs during the process of management of IE; 1 the amount of the grant) is still lacking; 2) delay in disbursement of financial aid party; 3) constraint of the party in reporting accountability (LPJ) financial aid funds of political parties in the city of Depok; 4) existence of inconsistent state of the party in the use of financial aid funds. Some efforts are being made, among others; 1) performs the technical guidance; 2) standard format for raw produce reports accountability of the use of the financial assistance fund; 3 strict sanctions); 4) existence of a regulation issued by the Central Government, i.e. the Government Regulation (PP) No. 1 Year 2018 about rising financial aid Funds of political parties.*